

Pertumbuhan hijau di G20 dan strategi Indonesia

Ramadhan Harisman¹

Pendahuluan

Dunia saat ini menghadapi masalah serius berupa krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, peningkatan emisi gas rumah kaca, kesenjangan pendapatan, ketidakseimbangan fiskal kronis dan terorisme (*World Economic Forum*, 2012). Masalah ketidakseimbangan fiskal kronis dialami oleh sebagian besar negara maju, sedangkan masalah serius lainnya sangat rentan dialami oleh negara berkembang.

Peningkatan permintaan global terhadap pangan, energi dan infrastruktur yang dipenuhi dengan pendekatan “*business as usual*” akan membuat dukung ekologi dunia tidak akan mampu memenuhinya. Konsekuensinya, terjadi volatilitas harga komoditas dan energi, polusi yang tak terkendali, kerusakan kesehatan manusia, dan kehilangan sistem keanekaragaman hayati.

Keterbatasan daya dukung alam serta berbagai dampak akibat pelaksanaan pembangunan secara “*business as usual*” tersebut, mendorong kita untuk memikirkan suatu konsep kebijakan pertumbuhan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam serta upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep yang relevan adalah pertumbuhan hijau. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian “hijau”, namun secara retorik sering dimaksudkan sebagai sesuatu yang ramah terhadap lingkungan.

Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (OECD, 2011a), efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih, meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta tahan bencana (World Bank, 2012a). Selain itu, pertumbuhan hijau menekankan pada kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif secara sosial (UN ESCAP, 2010). Pertumbuhan hijau juga penting untuk menangani dampak perubahan iklim serta berkaitan erat dengan konsep ekonomi hijau

¹ Penulis adalah Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, email: rama.haris@gmail.com

yang bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sosial, dan secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2011).

Strategi Pertumbuhan Hijau

Strategi pembangunan nasional harus didasarkan pada kekuatan, hambatan dan tantangan masing-masing negara (OECD, 2012a). Negara maju, *emerging market*, dan negara berkembang mempunyai peluang dan tantangan yang berbeda dalam upaya meng' hijau' kan pertumbuhannya, tergantung situasi politis dan ekonomi masing-masing (OECD, 2011a). Suatu strategi pertumbuhan hijau yang baik akan mampu menyediakan manfaat lingkungan dan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, strategi ini bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak cukup baik yang disebabkan masalah kebijakan atau kelembagaan, maka pertumbuhan hijau tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan dimaksud apabila masalah strukturalnya tidak dibenahi terlebih dahulu.

Dalam jangka pendek, umumnya kebijakan hijau akan membutuhkan banyak pembiayaan seperti biaya operasional dan biaya investasi yang cukup tinggi. Sedangkan dalam jangka panjang, kebijakan hijau dirancang untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek biasanya akan terjadi *trade-off* antara upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pertumbuhan hijau perlu dirancang dengan tujuan khusus untuk memitigasi *trade-off* dimaksud dengan memaksimalkan sinergi dan manfaat ekonomi jangka pendek seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta peningkatan efisiensi.

Transisi menuju paradigma hijau memerlukan perubahan mendasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Integrasi ketiga dimensi tersebut dalam perumusan kebijakan adalah sebuah keharusan. Namun demikian, perlu dirumuskan sebuah solusi kebijakan yang saling menguntungkan. Upaya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian akses layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan semua fasilitas yang dapat dinikmati oleh suatu masyarakat modern harus dilakukan sejalan dengan

penghargaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Transformasi ke pertumbuhan hijau tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar, transfer teknologi serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. Sangat mungkin terjadi kesenjangan antara tingkat perkembangan dan kesiapan transformasi dimaksud. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan suatu terobosan dalam pengembangan dan penerapan teknologi serta pembangunan kapasitas yang diharapkan mampu membuka alternatif pekerjaan dan keterampilan bagi masyarakat yang selama ini menyandarkan kegiatan ekonomi kepada sumber daya alam.

Selain itu, konsep pertumbuhan hijau tidak boleh mendikte dan tidak mengarahkan kepada hambatan teknis baru untuk perdagangan serta tidak menerapkan persyaratan-persyaratan baru untuk akses ke pembiayaan atau bantuan negara donor. Konsep pertumbuhan hijau harus dirancang sebagai suatu konsep rumah tumbuh dan memperhitungkan kekhasan dan tingkat pembangunan di setiap negara berkembang.

Untuk melaksanakan pertumbuhan hijau, OECD mengusulkan suatu strategi yang terdiri atas 5 proses berikut:

1. Memenuhi kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan hijau.

Kebutuhan model pertumbuhan ekonomi hijau sangat tergantung pada kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang potensial pada pelaksanaan pertumbuhan hijau merupakan sektor yang menjadi objek dalam model pertumbuhan hijau.

2. Menghilangkan penghambat pencapaian pertumbuhan hijau.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif jika hambatan seperti sistem pajak yang tidak mengarah pada kelestarian lingkungan dihilangkan, dan diberikan insentif bagi pembangunan yang berorientasi kepada *sustainable economy*.

3. Strategi politik dalam pengaplikasian pertumbuhan hijau.

Peranan politik sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan hijau, hal ini sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan suatu model pertumbuhan.

4. Pengukuran indikator pertumbuhan hijau.

Indikator pertumbuhan hijau ini digunakan dalam pemantauan dan pengukuran keberhasilan suatu model pertumbuhan di suatu negara. Oleh karena itu, pengembangan indikator pertumbuhan hijau sangat diperlukan dalam strategi pelaksanaan pertumbuhan hijau.

5. Penerapan konsep pertumbuhan hijau secara berkesinambungan.

Setelah tahapan sebelumnya telah dilakukan maka yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan pertumbuhan hijau yang terarah dalam waktu yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Hijau dan Negara Berkembang

Emisi gas rumah kaca (GRK) dari negara berkembang (minus China), hanya berkisar 20% dari total emisi GRK global (*New York Times*, 2007). Namun demikian, apabila konsep pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengikuti konsep pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan negara maju, maka total emisi GRK global diyakini akan meningkat cukup drastis dan cepat. Kekhawatiran ini cukup beralasan dengan makin meningkatnya kapasitas dan kontribusi negara berkembang pada perekonomian global pada beberapa tahun terakhir. Namun sayangnya hal ini juga dibarengi dengan meningkatnya emisi GRK dan penggunaan sumber daya alam. Dampak sosial dan ekonomi dari penurunan kualitas lingkungan merupakan tantangan serius yang dihadapi negara berkembang mengingat ketergantungan mereka pada sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan kerentanan terhadap energi, makanan, air bersih, perubahan iklim dan risiko cuaca ekstrim. Perubahan iklim yang terjadi sejak beberapa dekade yang lalu, sangat mungkin disebabkan oleh aktivitas manusia. Negara-negara berkembang yang belum begitu besar kontribusinya terhadap upaya penurunan produksi emisi gas rumah kaca, pada akhirnya justru menjadi pihak yang paling banyak terkena dampak perubahan iklim, khususnya yang terjadi pada masyarakat miskin yang ada di dalamnya.

Kondisi demikian cukup ironis, mengingat negara berkembang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan tujuan pembangunan masing-masing negara, namun di sisi lain mereka juga dituntut untuk mulai mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembangunannya. Prinsip “*common but differentiated responsibilities*” memang masih cukup relevan diperjuangkan mengingat kebutuhan untuk melindungi lingkungan tidak harus dengan

mengorbankan hak negara berkembang untuk pembangunan. Perlu mekanisme kompensasi yang menguntungkan negara berkembang, baik keuangan maupun teknologi transfer agar tercapai situasi yang saling menguntungkan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian pertumbuhan hijau global.

Bagi negara berkembang, konsep pertumbuhan hijau secara politis dapat diterima sepanjang konsep tersebut berkontribusi positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan milenium termasuk dampak dari perubahan iklim. Upaya mitigasi perubahan iklim dengan pengurangan emisi GRK akan menghasilkan berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia seperti pengembangan sumber-sumber energi terbarukan yang akan berdampak terhadap pengurangan polusi udara serta kesehatan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 1,5 juta bayi meninggal setiap tahunnya sebagai dampak polusi udara dari bahan bakar padat. Lebih dari 85% diantaranya (sekitar 1.3 juta jiwa) disebabkan oleh sisa-sisa pembakaran batu bara. Dampak positif lainnya adalah makin kuatnya ketahanan energi suatu negara. Pasokan energi menjadi lebih fleksibel dikarenakan tersedianya berbagai sumber energi pengganti dan berkurangnya ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Pertumbuhan Hijau dan G20

Pembahasan isu pertumbuhan hijau di G20 merupakan salah satu agenda prioritas dari Keketuaan Meksiko pada G20 tahun 2012. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan baik untuk infrastruktur, efisiensi energi, pembangunan berorientasi lingkungan, dan perjuangan menghadapi perubahan iklim. Agenda pertumbuhan hijau di G20, pertama kali diperkenalkan pada KTT Seoul, 2010. Masuknya agenda pertumbuhan hijau diharapkan mampu, secara simultan, mempercepat pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja serta memenuhi berbagai tantangan lingkungan dan sosial.

Pembahasan pertumbuhan hijau diharapkan mampu mengeksplorasi *new source of growth* melalui kebijakan yang berorientasi pada inovasi dengan pemanfaatan teknologi maju yang baru, terutama di energi bersih dan inovasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi tersebut diharapkan menjadi pendorong utama

dalam penciptaan lapangan kerja dan kompetensi baru. Aspirasi ini kembali didengungkan pada KTT Cannes, 2011 di mana para pemimpin G20 berkomitmen untuk menerapkan kebijakan untuk memacu inovasi dan penerapan teknologi energi bersih dan efisien. Berdasarkan hal-hal tersebut, Meksiko menjadikan pertumbuhan hijau sebagai salah satu agenda prioritas pada KTT Los Cabos, 2012.

Pembahasan pertumbuhan hijau perlu didukung dengan pembaharuan komitmen politis mengenai pembangunan berkelanjutan pertumbuhan hijau. Dalam konteks ini, pembahasan promosi pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau dan penanganan perubahan iklim dibahas oleh Subkelompok Kerja Energi dan Pertumbuhan pada Kelompok Kerja Energi dan Komoditas pada *Track* Keuangan dan Kelompok Kerja Pembangunan pada *Track Sherpa*.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, pada pertemuannya, tanggal 25-26 Februari 2012, di Mexico City, meminta OECD, Bank Dunia dan lembaga terkait di PBB, untuk menyiapkan suatu laporan yang menyajikan berbagai opsi bagi negara-negara G20 mengenai upaya untuk memasukkan pertumbuhan hijau dan kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural. Opsi kebijakan yang disiapkan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pembangunan tiap-tiap negara. Selanjutnya, para Menteri dan Gubernur tersebut juga berjanji akan memberikan kontribusi pada persiapan laporan dan dengan sukarela menginformasikan tindakan masing-masing negara untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural. Laporan ini menyediakan seperangkat opsi/pilihan kebijakan bagi negara-negara, yang dapat dimanfaatkan untuk merancang suatu strategi pertumbuhan hijau, antara lain:

- Reformasi struktur pajak dan pungutan, dengan memperhatikan harga eksternalitas lingkungan yang negatif, seperti emisi polusi dan penggunaan sumber daya alam yang langka secara tidak efisien.
- Reformasi yang meningkatkan kerja dari pasar produk, di mana sinyal harga memerlukan pasar yang berfungsi dengan baik dalam rangka memberikan insentif untuk mengurangi eksternalitas tersebut dan untuk memacu inovasi dan investasi dalam aktifitas-aktifitas yang lebih bersih.
- Peraturan-peraturan lain seperti regulasi dan standar serta pendekatan lain untuk mengatasi kegagalan informasi, masalah pengukuran dan bias perilaku untuk melengkapi instrumen-

instrumen yang berbasis harga. Pengenaan harga pada eksternalitas merupakan suatu elemen penting. Namun pengenaan harga saja tidak akan cukup karena pada kondisi tertentu pengenaan harga akan sulit diterapkan atau sinyal harga mungkin lemah.

- Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk kebijakan yang tepat untuk penyediaan infrastruktur hijau. Sebuah perpaduan instrumen pasar dan non-pasar yang tepat merupakan hal yang penting pada sektor infrastruktur jaringan dan keduanya akan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan.
- Kebijakan-kebijakan Inovasi, di mana kemajuan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyebaran yang cepat atas barang, jasa dan teknologi hijau di seluruh dunia akan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan dan investasi internasional akan berperan cukup penting.
- Kebijakan sosial yang lebih luas untuk pemanfaatan sinergi dengan lebih baik dan meminimalkan *trade off* antara tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk mengkaji kebijakan pasar kerja yang dapat memfasilitasi transisi menuju struktur ekonomi yang lebih hijau dan lebih inklusif

Dalam mengevaluasi elemen kunci dari kebijakan pertumbuhan hijau, desain paket kebijakan akan bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan tingkat pembangunan, pertimbangan ekonomi politik dan preferensi sosial. Kondisi pasar juga perlu dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan. Selanjutnya, desain dan implementasi kebijakan sering menimbulkan isu tatakelola pemerintah yang berbeda pada tiap-tiap negara. Kesulitan dalam memantau kinerja lingkungan dan kepatuhan, mengumpulkan pajak hijau atau menata pasar baru, dapat mempengaruhi pilihan instrumen kebijakan di negara-negara dengan ekonomi informal yang besar dan di mana ada kapasitas yang lemah dalam perancangan kebijakan lingkungan atau pengimplementasiannya.

Pada saat yang sama, tantangan sosial dan politik dalam mempromosikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan tidak bisa dianggap sederhana. Perubahan menuju ekonomi hijau akan memerlukan transformasi radikal dari model pembangunan saat ekonomi (OECD, 2011a). Seperti yang terjadi pada semua proses transformatif, perubahan ini

kemungkinan akan mengubah keunggulan komparatif jangka pendek dan jangka panjang dari negara, industri dan kelompok masyarakat. Pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan juga memerlukan perubahan perilaku (Bank Dunia,2012a). Dalam jangka pendek, beberapa aspek dari transformasi dapat membebankan biaya dan *trade-off* antar tujuan kebijakan alternatif. Selain itu akan juga mendapat tentangan sosial dan politis dari konstituen yang terkena dampaknya, meskipun manfaat dan keberlanjutan akan dinikmati dalam jangka panjang. Oleh karena itu potensi biaya dan risiko yang terkait dengan reformasi struktural hijau perlu dipertimbangkan secara cermat baik dari sisi waktu maupun desain-nya.

Transisi ke pertumbuhan hijau tidak secara langsung akan membantu mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan terutama yang kehidupannya sangat terkait dengan sumber daya lingkungan. Perlu dukungan peningkatan kapasitas secara konsisten agar pertumbuhan ekonomi hijau-nya dapat terus dilanjutkan dan bahkan dipercepat. Untuk tujuan ini, setiap dampak yang tidak diinginkan dari tindakan tersebut harus dipertimbangkan dalam perancangan kebijakan, seperti dampak yang mungkin terjadi akibat dari penggunaan sumber energi yang berasal dari pertanian (misalnya untuk *biofuel*) untuk pasar komoditas.

Kelompok Kerja Pembangunan G20 (DWG) telah menghasilkan laporan yang menyediakan panduan untuk penyiapan kerangka kebijakan nasional pertumbuhan hijau inklusif. Laporan yang disiapkan oleh *co-fasilitator inclusive green growth (IGG)* dan Organisasi Internasional (AfDB, OECD, PBB, dan Bank Dunia) ini menyajikan seperangkat opsi kebijakan yang fleksibel dan praktis membantu negara berkembang mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan kendala untuk mewujudkan pertumbuhan hijau inklusif. Perangkat kebijakan dimaksud memerlukan rincian kebijakan spesifik dan generik baik lingkungan, ekonomi maupun sosial dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah daftar yang pasti namun lebih sebagai sebuah dokumen yang perlu di *update* secara reguler. Hal ini diperlukan sebagai gambaran inovasi dan investasi jangka panjang untuk menghindari ketergantungan pada infrastruktur dan teknologi yang mahal dan tidak efisien. Agar investasi dan kebijakan tersebut dapat berjalan, diperlukan tata kelola dan kerangka kebijakan yang tepat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan *knowledge sharing*.

Tool kit atau panduan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya dari negara-negara yang secara sukarela ingin merancang dan melaksanakan kebijakan pertumbuhan hijau inklusif

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sektor swasta dan ketersediaan sumber daya untuk pertumbuhan hijau.

Pertumbuhan Hijau dan Indonesia

Perspektif hijau bukan suatu isu yang asing bagi Indonesia. Strategi pembangunan Indonesia mengacu kepada 4 pilar pembangunan yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. Hal ini merefleksikan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai pertumbuhan hijau, Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi dan daya dukung sumber daya luas lahan baik lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan serta kandungan sumber daya alam baik yang tidak dapat diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui.

Dari sisi dukungan luas lahan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan terbesar dunia, bahkan memiliki hutan hujan tropis terluas di kawasan Asia. Selain itu, lebih kurang separuh lahan gambut tropis di dunia berada di Indonesia yaitu lebih kurang seluas 21 juta hektar. Hutan Indonesia yang juga diandalkan sebagai paru-paru dunia akhir-akhir ini mengalami deforestasi yang sangat menyedihkan, bahkan di Kalimantan pada tahun 2010 hanya tinggal 44,4% dan diperkirakan tahun 2020 semakin berkurang dan tinggal 32.6%. Menurut data UNDP, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan, terutama deforestasi. Bagi Indonesia, hutan bukan hanya terkait dengan cadangan karbon namun lebih dari itu adalah kekayaan akan keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia merupakan rumah dari hampir 30 ribu spesies tumbuhan. Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Jika biota laut diikutsertakan, Indonesia diklaim sebagai negara yang paling kaya keanekaragaman hayati. Sayangnya, ketika biodiversitas Indonesia menjadi komoditas penting di mata dunia, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati masih lemah. Banyak biota Indonesia diambil tanpa sepengetahuan pihak terkait. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati Indonesia harus diperlakukan sebagai kekayaan negara yang harus diurus, dipelihara, dikonservasi dengan pemanfaatannya secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia yang pada beberapa dasawarsa lalu pernah menjadi salah satu negara eksportir utama minyak bumi dunia, sekarang telah menjadi *net-importing country*. Hal ini sangat mungkin akan terjadi pula dengan gas alam dan batu bara, apabila keduanya tidak dikelola dengan baik dan bijak. Di samping itu, bidang energi termasuk tenaga listrik dan transportasi, merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang cukup besar di Indonesia dengan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Emisi GRK dari sektor transportasi tahun 2009, mencapai sekitar 67 juta ton CO₂ dan setiap tahunnya tumbuh dengan laju sekitar 8-12%. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan pertumbuhan pergerakan (*trip*) penumpang dan barang, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 48% dari konsumsi energi primer nasional, khususnya minyak bumi dengan moda yang menyerap konsumsi terbesar secara berurutan transportasi darat (88%), udara (7%), perkeretaapian (4%), dan sisanya transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan (1%). Peningkatan konsumsi energi dipicu oleh harga BBM yang murah dan bersubsidi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya beban subsidi BBM pada APBN

Perubahan gaya hidup manusia dari yang boros energi ke perilaku hemat energi akan menyelamatkan lingkungan hidup. Perubahan iklim sudah terjadi dan manusia harus mengubah gaya hidupnya bila ingin selamat. Konsumsi energi yang berlebihan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Sumber daya alam dieksploitasi untuk memenuhi konsumsi yang diciptakan, bukan konsumsi yang lahir karena kebutuhan dasar. Untuk memenuhi konsumsi itu, bahan bakar fosil dieksploitasi dan tanah untuk pertanian dirambah, kebun, hutan tanaman industri, hingga bahan tambang. Perilaku eksploitatif ini meningkatkan produksi GRK di udara. Panas sinar matahari yang terhalang oleh GRK tersebut akan sulit untuk ke luar selimut atmosfer sehingga sangat berpotensi menaikkan suhu bumi.

Mengingat kondisi tersebut, sangat dirasakan urgensi untuk mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor yang lebih penting seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, kebijakan pengurangan bahkan penghapusan subsidi energi seringkali mendapat hambatan politis. Dalam rangka menstabilkan pasokan energi perlu dikembangkan strategi kebijakan energi bersih dan berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan serta efisiensi energi. Kedua strategi kebijakan tersebut tidak saja diyakini mampu menstabilkan pasokan energi namun juga mampu mengurangi emisi GRK.

Disamping itu, diperlukan suatu regulasi yang menjamin keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestarian daya dukung lingkungan. Penyusunan regulasi dimaksud harus didahului dengan kajian menyeluruh terhadap komponen terkait dengan dampak dari pengelolaan sumber daya alam bukan regulasi yang mengejar percepatan ekonomi, melainkan juga mampu meminimalkan kerusakan lingkungan yang semakin berat. Regulasi itu mesti selaras, antara kemanfaatan generasi sekarang dan kelangsungan generasi mendatang.

Pembiayaan investasi infrastruktur hijau pada tahun 2004-2011, menunjukkan tren yang meningkat yaitu rata-rata sebesar 26% per tahun, dengan total investasi baru sebesar \$247 milyar pada tahun 2010 dan \$260 milyar pada tahun 2011. Adapun total pembiayaan investasi baru di bidang energi terbarukan untuk wilayah Asia dan Pasifik pada tahun 2004-2011, rata-rata meningkat per tahun sebesar \$32,7 milyar.

Peluang pembiayaan investasi hijau sepatutnya bisa optimal dimanfaatkan oleh Indonesia mengingat masih rendahnya realisasi investasi hijau. Sebagai gambaran, total konsumsi energi dunia yang berasal dari fosil sebesar \$630 milyar, sedangkan total konsumsi energi dunia yang bersumber dari energi terbarukan sebesar \$66 milyar pada tahun 2011. Di samping itu, perkembangan riset dan teknologi di bidang panel surya juga turut membantu pengembangan industri hijau dengan penurunan harga modul surya (solar panel) sebesar 75% sejak tahun 2008.

Resesi ekonomi dunia pada 2008 telah membuktikan kemampuan ekonomi ramah lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja. Krisis yang kemudian diperparah oleh inflasi dan kredit macet perbankan ini memaksa sejumlah negara memberikan stimulus fiskal untuk membuka lapangan kerja. China dan Korea Selatan adalah negara pertama yang memasukkan program hijau dalam stimulus mereka dengan memberikan stimulus terutama bagi usaha kecil menengah.

Bagi Indonesia, hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai peluang kerja dan keterampilan terkait pertumbuhan hijau. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kualitas penyediaan keterampilan pada sistem pendidikan. Penyiapan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, tidak hanya akan memfasilitasi kemampuan pekerja untuk mempercepat penyesuaian terhadap perubahan pasar tenaga kerja, namun juga dapat meningkatkan kapasitas bisnis dalam mengadopsi dan menghasilkan teknologi hijau yang baru.

Dalam laporan Green and Decent Job dari International Trade Union Confederation (ITUC), Indonesia menempati urutan ketiga negara paling potensial menciptakan lapangan kerja di bidang ekonomi hijau, setelah Amerika Serikat dan Brazil. Dari laporan tersebut, jika Indonesia melakukan investasi 2 persen dari pendapatan negara untuk ekonomi hijau, maka dalam lima tahun ke depan, Indonesia bisa menciptakan 4,4-6,3 juta lapangan kerja baru. Lebih lanjut disampaikan bahwa investasi sebesar 2 persen dimaksud tidak mesti dibiayai dengan anggaran pemerintah, namun bisa dilaksanakan oleh swasta. Adapun pekerjaan yang dikategorikan sebagai green jobs meliputi antara lain: pengolahan limbah, daur ulang sampah, pertanian organik, pembuatan panel surya, dan berbagai pekerjaan lain yang berorientasi terhadap lingkungan.

Isu utama lainnya yang perlu dicermati adalah peran dari *carbon tax/carbon pricing* sebagai *new source of financing* dalam mendorong pertumbuhan hijau. Reformasi fiskal yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan lingkungan akan memerlukan revisi kebijakan terkait struktur pajak, termasuk pengenaan tambahan pajak lingkungan dan *review* atas subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien. *Carbon pricing* diyakini bisa menjadi salah satu sumber utama pembiayaan perubahan iklim dimasa mendatang. Menurut laporan *High-level Advisory Group on Climate Change Financing* (AGF), dengan asumsi harga karbon sebesar \$20-\$25 per ton, dana yang dapat dihasilkan dari negara-negara maju terkait dengan *carbon pricing* akan mencapai \$375 milyar pada tahun 2020. Untuk itu, upaya pengembangan potensi pasar karbon domestik di Indonesia serta perbaikan regulasi yang ada pada tataran global perlu mendapatkan prioritas penanganan.

Daftar Pustaka

- A Toolkit of Policy Options to Support Inclusive Green Growth*. Submission to the G20 Development Working Group by the AfDB, the OECD, the UN and the World Bank. 2012;
- Badan Kebijakan Fiskal. (2011). *Indonesia's Green Growth Strategy For Global Initiatives: Developing A Simple Model And Indicators Of Green Fiscal Policy In Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Green Growth and Developing Countries*. OECD. June 2012;
- Green Growth in Poor, Small and Vulnerable States: The Green Economy as a Transformation Pathway to Sustainable Development*. A Paper for the Commonwealth-Francophonie-G20

Development Working Group Outreach Meeting, 19 April 2012, Washington, DC, 29 March 2012.

Green growth: implications for development planning. Climate & development Knowledge Network. July 2011.

Howes, S. and P. Wyrwoll. (2012). *Climate Change Mitigation and Green Growth in Developing Asia.* July 2012.

Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. World Bank. 2012;

Incorporating Green Growth and Sustainable Development Policies Into Structural Reform Agendas. A Report By The OECD, The World Bank and The United Nations Prepared For The G20 Summit (Los Cabos, 18 - 19 June 2012).

Ja'far, M. (2009). *Energynomic: Ideologi Baru Dunia.*

Presentation Material of *G20 Seminar on Green Growth.* Co-organised by the Mexican G20 Presidency and the OECD. Paris. May 22, 2012.